



REALISME DAN ABSENNYA KEPEMIMPINAN GLOBAL: SITUASI KERJA SAMA INTERNASIONAL PADA WABAH VIRUS EBOLA DAN CORONA

Mergera Akbar Sinergi Putra Agung, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang. Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

An outbreak of a disease or plague is a phenomenon in which a dangerous viral genome spreads and infects various individuals both domestically and internationally. At a more infectious stage, the spread of this disease can be classified into two categories; namely epidemic and pandemic. In early 2014 the Ebola virus originating from Africa spread in various regions in Africa and internationally, eventually causing the Ebola virus epidemic. Then in early 2020 the Corona virus or COVID-19 originating from Tiongkok spread to various regions in Tiongkok and internationally until finally causing the Corona virus pandemic. With this event, the international community should be able to work together to handle so that the spread of these two viruses can be reduced and finally controlled. However, when the spread of the Ebola and Corona viruses occurred, the international cooperation that took place seemed not optimal and was unable to handle the events that occurred. This study will analyze this by using the question "Why is international cooperation in dealing with outbreaks of infectious viruses such as Ebola and Corona difficult to do?". The purpose of this study is to determine the factors that make international cooperation difficult to carry out despite the outbreak of dangerous viruses such as Ebola and Corona. This study uses an explanative qualitative research type. The main argument of this research is that the condition of the world without global leadership and the anarchic culture of international relations has resulted in non-optimal international cooperation in dealing with the Ebola and Corona virus outbreaks.

Keyword: *Outbreak, Ebola, Corona, Cooperation, global leadership, Anarchy.*

PENDAHULUAN

Ebola merupakan jenis virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di wilayah Sudan, Afrika Timur. Virus Ebola termasuk ke dalam keluarga *Floviridae* dan genus *Ebolavirus*. Virus Ebola juga memiliki lima jenis spesies dan empat di antaranya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Empat spesies virus Ebola yang berbahaya bagi manusia antara lain adalah: *Tai Forest Ebolavirus*, *Zaire Ebolavirus*, *Sudan Ebolavirus*, dan *Bundibugyo Ebolavirus*. Menurut para ahli, virus Ebola memiliki tingkat transmisi penyebaran yang sangat cepat karena dapat

ditularkan melalui kontak melalui tetesan darah, cairan urin, dan *droplet* air liur (Hendrawati, 2014:1). Terjadinya peristiwa wabah virus Ebola di wilayah Afrika Barat pada tahun 2014 kemudian langsung menjadi perhatian internasional saat itu. Sementara COVID-19 atau Corona merupakan virus terbaru dari keluarga *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia. Sebelum terjadinya wabah virus Corona pada tahun 2020, dunia sebenarnya telah pernah mengalami wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang juga berasal dari keluarga *coronavirus* pada tahun 2002. Terjadinya wabah virus Corona bermula pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dilaporkan oleh otoritas setempat bahwa ada beberapa orang yang mengalami pneumonia dengan gejala yang tidak diketahui.

Peristiwa wabah virus Ebola pertama kali diumumkan pada tanggal 25 Maret tahun 2014 oleh CDC (*Central Disease Control*). Terjadinya wabah virus Ebola pada bulan Maret disebabkan oleh varian Zaire Ebolavirus yang menyebar dengan cepat ke beberapa wilayah di Afrika. Pada bulan Maret, WHO (*World Health Organization*) juga menyatakan bahwa terdapat penyebaran virus Ebola di wilayah perkotaan Conakry di Guinea, Afrika. Dengan terjadinya penyebaran virus Ebola di salah satu perkotaan besar di wilayah Guinea, WHO pun mengirim tim peneliti untuk menyelidiki dan menangani peristiwa yang terjadi. Namun karena tim peneliti yang didatangkan oleh WHO belum memiliki pengalaman untuk menangani virus Ebola, maka tim yang dikirim oleh WHO tidak dapat meneliti peristiwa ini secara efektif (Wenham, 2017). Dua bulan setelahnya MSF (*Medecins San Frontieres*) mempublikasikan laporan bahwa penyebaran virus Ebola perlu mendapatkan perhatian lebih jauh karena telah terjadi krisis kesehatan yang cukup parah. Satu bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2014, WHO baru merespon laporan dari MSF dengan pengumuman PHEIC (*Public Health of International Concern*) dan meminta koordinasi internasional untuk menahan laju penyebaran virus secara efektif. MSF pun mengkritik WHO pada tanggal 15 Agustus tahun 2014 karena menganggap WHO telah menyepelekan masalah kesehatan serius (Ippolito et al., 2015).

Kemudian virus COVID-19 menjadi pandemi ketika WHO menyatakan penyebaran virus Corona mulai menyebar ke berbagai negara di dunia seperti Thailand, Jepang, AS, Vietnam dan Singapura. Kemudian pada tanggal 20 Januari tahun 2020, terdapat laporan bahwa terjadi peningkatan transmisi virus Corona di sejumlah provinsi di Tiongkok. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2020, WHO mendeklarasikan PHEIC sebagai respon terhadap situasi penyebaran virus yang semakin mengkhawatirkan. Pada saat dideklarasikannya PHEIC, virus Corona telah menginfeksi sebanyak 7.818 orang di seluruh

dunia. Pada tanggal 25 Februari tahun 2020, virus Corona akhirnya mencapai benua Afrika dan Eropa. Karena telah mencapai berbagai negara di dunia, pada tanggal 9 Maret tahun 2020, WHO menyatakan bahwa status penyebaran virus Corona telah menjadi wabah yang membahayakan kesehatan global (WHO, 2020).

Untuk menangani hal tersebut maka dibutuhkan kerja sama internasional yang optimal agar wabah penyebaran dapat ditanggulangi dan penyebaran virus Ebola dan Corona dapat diselesaikan dengan cepat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Corona justru tidak optimal. Hal ini diakibatkan negara-negara di dunia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan membantu negara lain. Sikap Amerika Serikat pada fase awal wabah virus Corona yang menuduh Tiongkok sebagai negara penghasil virus Corona dan menyebarkan kebencian rasial di negaranya adalah salah satu contoh sikap negara yang egois dan non-kooperatif pada masa wabah virus Corona (BBC, 2020).

Setelah wabah virus Corona berjalan selama setahun, sejumlah vaksin pun mulai muncul dan diedarkan ke berbagai negara di dunia. Namun ternyata, kerja sama internasional untuk mendistribusikan vaksin yang ada terkesan tidak optimal. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Amerika Serikat yang menolak untuk bergabung dengan COVAX untuk mendistribusikan vaksin yang tersedia di negara mereka (The Washington Post, 2020). Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga melakukan embargo vaksin AstraZeneca ke berbagai negara internasional. WHO memperingatkan Uni Eropa atas keputusannya ini karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat internasional (BBC, 2021).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona bisa dibilang tidak optimal. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meneliti mengapa dunia internasional sulit untuk bekerja sama sehingga kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona menjadi tidak optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Imam Gunawan, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian dengan metode ini juga bertujuan untuk mengembangkan konsep

sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2021). Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan tipe deskriptif yang dimana penelitian ini berusaha untuk mencoba untuk menjelaskan faktor penyebab tidak optimalnya kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona.

KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah membahas mengenai kerja sama internasional serta respon internasional dalam menanggapi wabah virus Ebola dan Corona. Beberapanya antara lain adalah penelitian milik Benton dan Dionne (2015) yang menyatakan bahwa terjadinya wabah virus Ebola pada tahun 2014 disebabkan oleh negara-negara di Afrika yang tidak mendukung penanganan wabah virus yang terjadi. Kemudian terdapat penelitian milik Brown, Cuetto, dan Fee (2006) menunjukkan bahwa terjadinya wabah virus diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan kerja sama oleh berbagai institusi internasional seperti WHO (*World Health Organization*), MSF (*Medecins Sans Frontieres*), CDC (*Centers for Disease Control*), dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Selanjutnya penelitian milik Hossain (2016) menyebutkan bahwa wabah virus Ebola terjadi karena WHO terlambat merespon laporan milik MSF di tahun 2014. Lalu terdapat penelitian milik Alvarez (2020) yang menyebutkan bahwa paska merebaknya virus Corona ke berbagai negara di seluruh dunia, terjadi kegagalan kerja sama antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan WHO. Terakhir terdapat penelitian milik Biscop (2020) yang menyatakan bahwa AS enggan bekerja sama dengan Tiongkok karena Donald Trump selaku Presiden AS tidak menanggapi secara serius fenomena wabah virus Corona.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai pisau analisis untuk menjelaskan faktor penyebab tidak optimalnya kerja sama internasional dalam menghadapi wabah virus Ebola dan Corona; teori realisme, konsep *hegemonic stability theory* milik teori liberalisme, konsep *g-zero*, serta konsep entropi termodinamika. Realisme adalah paradigma yang *state-centric*, yaitu anggapan bahwa negara merupakan *unitary actor* dan aktor paling dominan dalam politik internasional (Rosyidin, 2020:23). Realisme memiliki *core argument* yang menekankan kondisi dunia internasional yang anarki dan sifat dasar manusia yang tidak baik mengakibatkan hubungan antar negara hanya sebagai wadah untuk memenuhi

kepentingan masing-masing negara (Donnelly, 2000:9). Karena adanya keadaan anarki ini juga negara-negara selalu diliputi rasa curiga, cemas, dan takut akan maksud negara lain. Akibatnya hubungan antar negara lebih bersifat konfliktual alih-alih kooperatif (Rosyidin, 2020:23).

Dalam buku *Introduction to International Relations* karya Robert Jackson dan George Sorensen disebutkan juga bahwa asumsi dasar dari paradigma realisme adalah pertama pandangan yang pesimistis terhadap sifat dasar manusia; kedua hubungan internasional bersifat konfliktual dan hanya bisa diselesaikan oleh konflik antar bangsa; ketiga keamanan dan kedaulatan negara sangat berharga dalam dunia internasional dan; keempat bersikap skeptis terhadap keberlangsungan politik internasional (Jackson & Sorensen, 2013:67). Sebagaimana telah disebutkan oleh Donnelly, Jackson & Sorensen juga berargumen bahwa paradigma realis mempunyai *core assumption* berupa ketiadaan kepemimpinan yang lebih tinggi dalam dunia internasional (anarki) (Jackson & Sorensen, 2013:67).

Meskipun tidak ada kepemimpinan yang lebih tinggi dalam dunia internasional, hierarki antar negara masih tetap ada disini. Paradigma realis beranggapan bahwa hubungan internasional merupakan persaingan kekuatan untuk mendapatkan dominasi dan keamanan yang paling unggul untuk masing-masing negara. tentunya negara yang lemah akan sulit bersaing dengan negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2013:67). Kondisi yang tidak seimbang inilah yang mengakibatkan dunia internasional akan selalu dipenuhi oleh konflik (Burchill et al., 2005). Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi daripada yang lain juga dibahas oleh Ian Bremmer dalam bukunya yang berjudul *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World*. *G-Zero* mempunyai definisi sebagai sebuah tatanan dunia dimana tidak ada satupun negara ataupun aliansi antar negara yang mampu mengisi kepemimpinan global. Pada zaman dahulu di tahun 1940-an posisi kepemimpinan global diisi oleh negara Amerika Serikat karena tatanan dunia yang unipolar. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam tujuh dekade terakhir ini, kita hidup dalam tatanan dunia tanpa ada kepemimpinan global (Bremmer, 2012:11).

Ketiadaan kepemimpinan global dalam dunia internasional saat ini kemudian menyebabkan terjadinya kekacauan dalam skala global. Hal ini dijelaskan oleh konsep *entropy* milik Randall Schweller dalam bukunya yang berjudul *Maxwells Demon and the Golden Apple: Global Discord in the New Millenium*. Pada buku ini Schweller menjelaskan pola politik internasional menggunakan analogi entropi. Entropi merupakan salah satu isi dari Hukum Kedua Termodinamika yang memiliki keterkaitan dengan ketidakteraturan, ketidakpastian, dan

kekacauan (Schweller, 2014:36). Pengaplikasian entropi pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pembentukan es batu yang berasal dari molekul air. Perubahan air menjadi es batu disebabkan oleh jumlah entropi yang sangat rendah pada molekul air sehingga objek tersebut menjadi lebih padat dan teratur. Intinya, semakin tinggi entropi pada suatu objek maka semakin tinggi juga ketidakteraturan yang ada pada benda tersebut (Schweller, 2014:36). Entropi juga memiliki sifat bahwa suatu objek akan lebih mudah untuk dihancurkan daripada diperbaiki.

Dalam politik internasional, entropi diibaratkan sebagai struktur internasional yang berfungsi sebagai penahan (*constraint*) untuk membatasi dan menjaga perilaku negara-negara dalam batas yang wajar. Jika struktur internasional sudah tidak bisa membatasi perilaku negara, semakin tinggi juga kemungkinan negara-negara untuk bertindak semaunya tanpa batasan yang wajar dan akan menyebabkan ketidakteraturan (Schweller, 2014:41). Lemahnya struktur internasional untuk membatasi perilaku negara dapat dilihat paska perang dingin, ketika AS menjadi unipolar di tahun 1991. Status AS sebagai unipolar saat itu menyebabkan AS memiliki kebebasan untuk berpihak pada siapa saja yang menurut AS menguntungkan. Meskipun demikian, negara-negara lain juga memiliki kebebasan untuk tidak bekerja sama ataupun beraliansi dengan AS. Tanpa adanya kekuatan lain selain AS, negara-negara tidak perlu khawatir dengan ancaman negara besar lainnya, karena AS merupakan *command of the commons* atau negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia dan dapat memastikan keamanan dunia sebagai unipolar (Schweller, 2014:48).

Di satu sisi, kondisi dunia yang memasuki fase multipolar saat ini juga menawarkan masalah baru pada struktur internasional yang ada. Dengan ketiadaan satu negara yang bertindak sebagai unipolar, maka negara-negara yang memiliki pengaruh yang sama besarnya akan saling bersaing satu dengan yang lainnya dan cenderung memilih opsi perang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada penyelesaian masalah yang tidak damai (seperti perang) untuk menyelesaikan permasalahan (Schweller, 2014:50). Dengan sikap negara yang demikian maka kondisi dunia internasional akan lebih konfliktual karena terjadi penambahan “entropi” dalam struktur internasional yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Schweller menawarkan solusi yang bernama *Hegemonic Wars*. *Hegemonic Wars* merupakan situasi dimana negara-negara yang berpengaruh di dunia saling berperang satu dengan yang lain dan akhirnya menyebabkan pembaharuan struktur internasional (Schweller, 2014:51). Hal ini selaras dengan sifat entropi yang menyatakan bahwa suatu objek (sistem internasional) lebih mudah dihancurkan daripada diperbaiki (Schweller, 2014:36).

Meskipun menurut Schweller terdapat kelemahan struktur internasional dalam unipolarisme, *Hegemonic Stability Theory* (HST) menyatakan bahwa hegemon global tetap dibutuhkan agar kestabilan dunia internasional dapat terjaga dengan baik. HST pertama kali dicetuskan oleh Charles P. Kindleberger, Robert Gilpin, dan Stephen Krasner pada pertengahan tahun 1970an. Teori ini memiliki argumen bahwa tanpa peran suatu aktor yang hegemon maka kondisi internasional yang stabil tidak mungkin bisa tercipta (Yazid, 2015:67). Kindleberger, Gilpin, dan Krasner mengambil contoh pada negara Inggris di abad ke-19 dan AS pasca perang dunia kedua yang mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi internasional karena statusnya yang merupakan kekuatan hegemon di masa tersebut (Webb & Krasner, 1989:183).

Kindleberger secara spesifik menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides* bahwa agar perekonomian dunia menjadi stabil, diperlukan sebuah *stabilizer* yang mampu mengatur perputaran ekonomi internasional dan distribusi barang ke seluruh dunia (Kindleberger, 1981:247). Negara yang pernah menjadi *stabilizer* dalam perekonomian internasional adalah Inggris saat melakukan kolonialisasi pada abad ke-19 dan AS paska perang dunia kedua hingga tahun 1971 (Kindleberger, 1981:247). Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, belum ada negara yang mampu dan mau menggantikan hegemoni global seperti yang dilakukan oleh Inggris dan AS pada masa lampau. Ketiadaan hegemon global akhirnya berimplikasi pada kesenjangan perekonomian internasional karena pendistribusian barang yang tidak merata antar negara (Kindleberger, 1981:249).

Pernyataan milik Kindleberger juga sejalan dengan pernyataan milik Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Gilpin menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah hegemon tunggal sebagai pemimpin untuk menggerakkan roda perekonomian internasional (Gilpin, 2001:93). Dalam buku ini, Gilpin juga mengutip argumen para ekonom yang pro terhadap HST dalam dunia internasional; beberapanya ialah Barry Eichengreen, Nobel Laureate Robert Mundell, Bruno Frey, dan Mancur Olson (Gilpin, 2001:95). Eichengreen berpendapat bahwa situasi multilateralisme yang optimal sepanjang sejarah, terjadi saat adanya kekuatan dominan dalam dunia internasional. Lebih lanjut, Eichengreen menjelaskan bahwa ketiadaan hegemon akan mengakibatkan sulitnya kerja sama internasional dalam bidang perekonomian internasional (Gilpin, 2001:96). Mundell sebagai ahli dalam urusan keuangan internasional juga menekankan bahwa kestabilan sistem keuangan internasional bergantung dengan kehadiran sebuah hegemon global (Gilpin, 2001:96).

Dengan demikian posisi AS ataupun negara manapun yang mampu mengisi posisi kepemimpinan global sangat dibutuhkan agar kestabilan politik dan ekonomi internasional dapat terjaga dengan baik. Tetapi yang terjadi saat ini adalah AS tidak mampu mengisi posisi kepemimpinan global karena pengaruhnya yang sudah luntur dalam dunia internasional. Charles A. Kupchan dalam tulisannya yang berjudul *No One's World* menyatakan bahwa saat ini AS tidak menyanggah status sebagai *hegemonic power* lagi. Hal ini dikarenakan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brazil telah mampu menaikkan pengaruhnya di dunia internasional (Kupchan, 2012:7). Turunnya AS dari posisi kepemimpinan global pun dinyatakan pula oleh Amitav Acharya dalam bukunya yang berjudul *The End of American World Order*. Disini Acharya menulis bahwa saat ini berada di dalam fase *Multiplex* atau multipolar. Saat ini negara-negara seperti BRICS (*Brazil, Russia, India, Tiongkok, dan South Africa*) dapat mengimbangi kekuatan AS dalam dunia internasional dan menyebabkan AS turun dari posisinya sebagai hegemoni global (Acharya, 2014:7).

PEMBAHASAN

Ebola Virus Disease atau EVD merupakan wabah penyebaran penyakit yang muncul dan menyebar di Afrika pada 2014. Dalam kurun waktu hanya dua bulan, virus Ebola dinyatakan sudah berbagai wilayah di Afrika beberapa nya adalah Guinea dan Sierra Leone. Sementara *Corona Virus Disease* atau Corona merupakan wabah penyebaran penyakit yang muncul di Hubei, Tiongkok pada tahun 2019 dan dalam kurun waktu yang sama seperti virus Ebola, virus Corona sudah dideteksi di berbagai wilayah di dunia. Dalam menghadapi penyebaran virus yang masif seperti wabah virus Ebola dan Corona dibutuhkan kerja sama yang kompak agar penyebaran virus dapat ditangani serta ditekan dengan efisien. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah kerja sama internasional dalam menghadapi penyebaran virus Ebola dan Corona tidak optimal dan dipenuhi oleh berbagai kepentingan negara.

Peristiwa penyebaran virus Ebola yang terjadi pada tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan kultur hubungan internasional yang anarki, sikap negara yang egois, serta absennya kepemimpinan global saat itu. Terdapat beberapa aktor internasional yang berpengaruh dalam peristiwa wabah virus Ebola di Afrika; yang pertama adalah WHO dan MSF selaku organisasi internasional yang dominan dalam memainkan perannya pada penanganan wabah virus Ebola, dan yang kedua adalah AS, Inggris dan Jerman selaku negara internasional yang dominan dalam penanganan wabah virus Ebola yang terjadi di Afrika. Selain kondisi dunia internasional

yang konfliktual dan absennya kepemimpinan global, ketika wabah virus Ebola terjadi terdapat situasi anarki domestik yang juga mendorong sulitnya penanganan penyebaran virus ini di wilayah Afrika. Robert Kaplan dalam bukunya yang berjudul *The Coming Anarchy* menjelaskan bahwa wilayah Afrika adalah simbol internasional yang menggambarkan betapa bahayanya anarki domestik dalam suatu negara; perang saudara tanpa ada yang bisa mengontrol, perebutan sumber daya akibat adanya kelangkaan, serta negara lintas batas yang tidak bisa bekerja satu dengan yang lainnya (Kaplan, 2001:7).

Dengan adanya situasi anarki domestik yang ada di wilayah Afrika, maka harapan paling besar untuk mengatasi wabah virus Ebola yang terjadi ada pada badan ataupun organisasi internasional yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan global. Namun seperti yang telah disebutkan diatas, WHO gagal bertindak sebagai pemimpin dalam penanganan wabah virus Ebola yang terjadi di Afrika. Perilaku WHO yang sedemikian rupa dapat dijelaskan melalui faktor anarki, sikap egois negara, konsep *G-Zero* milik Bremmer, konsep entropi milik Schweller, dan *Hegemonic Stability Theory*, yang nantinya terdapat kaitan langsung dengan kerja sama antar negara dalam menangani wabah virus Ebola.

Pertama-tama faktor anarki memiliki peranan penting pada kinerja WHO yang terlihat tidak optimal saat menangani wabah virus Ebola di Afrika. Kondisi anarki saat wabah virus Ebola terjadi adalah ketika negara sebagai aktor utama dalam dunia internasional kurang memiliki inisiatif untuk membantu dan malah menempatkan WHO sebagai pemimpin penanganan wabah secara tidak langsung dengan menaruh ekpektasi yang tinggi terhadap kinerja WHO dengan menempatkan WHO sebagai responden satu-satunya saat terjadi situasi penyebara (Wenham, 2017:3). Ekspektasi dari negara-negara internasional kepada WHO tidak dibarengi dengan realisasi bantuan internasional untuk membantu WHO dalam mengatasi wabah virus Ebola. Pasca pengumuman PHEIC oleh WHO pun respon dari negara-negara internasional juga masih belum optimal. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa terjadi kurangnya inisiatif negara-negara internasional pasca dideklarasikannya PHEIC yang dapat dilihat dari keterlambatan pendanaan internasional dalam upaya penanganan wabah virus Ebola di Afrika, serta sikap AS, Inggris, dan Jerman yang tidak menepati janji kepada MSF ketika organisasi ini meminta bantuan militer untuk membantu distribusi logistik di wilayah terdampak wabah virus Ebola.

Kemudian mengapa hal ini terjadi? Mengapa bantuan internasional baru tiba ketika virus Ebola telah mencapai negara-negara besar? Hal ini bisa dijelaskan melalui kultur

hubungan internasional yang anarki, konsep *G-Zero*, konsep entropi serta *Hegemonic Stability Theory*. Dimulai dari anarki dalam hubungan internasional, sifat hubungan internasional yang demikian mengakibatkan peringatan serta permintaan bantuan internasional oleh MSF diacuhkan oleh WHO selaku badan kesehatan internasional. Kondisi ketiadaan otoritas yang lebih tinggi dalam dunia internasional. Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi pada situasi anarki menyebabkan WHO ataupun negara-negara besar tidak berkewajiban untuk merespon permintaan bantuan internasional dari MSF untuk membantu penanganan wabah virus Ebola yang terjadi di Afrika (Antunes & Camisao, 2018:3).

Lalu ketiadaan entitas pemimpin global ketika wabah virus Ebola terjadi juga mengakibatkan bantuan internasional yang datang dengan terlambat. WHO yang diandalkan oleh negara-negara internasional pun gagal menjalankan tugasnya dalam penanganan wabah virus Ebola yang terjadi. Dalam hal ini, *Hegemonic Stability Theory* menjelaskan bahwa suatu organisasi internasional tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya bantuan dari sebuah hegemon global. Organisasi internasional ini hanya akan efektif jika setiap tindakannya didukung oleh hegemon global yang ada dalam dunia internasional (Webb & Krasner, 1989:184).

Dari waktu ke waktu, dunia internasional hanya punya dua negara yang pernah berstatus sebagai hegemon global; Amerika Serikat pasca perang dunia kedua dan Inggris pada abad ke-19 (Webb & Krasner, 1989:183). Webb dan Krasner dalam tulisannya menyatakan ketika Inggris menjadi pemimpin global pada abad ke-19 situasi dunia internasional yang terjadi relatif stabil dan minim akan konflik (Webb & Krasner, 1989:184). Bremmer dalam bukunya juga menyatakan bahwa posisi Amerika Serikat sebagai pemenang perang dunia kedua membuat pengaruhnya dalam dunia internasional menjadi sangat kuat dan mampu menjadi hegemon global saat itu (Bremmer, 2012:13). Acharya menyebut situasi hegemoni global oleh Amerika Serikat ini sebagai *American World Order* atau AWO (Acharya, 2014:2).

Ketika wabah virus Ebola terjadi di Afrika, dua negara yang sempat menjadi hegemon global ini telah kehilangan statusnya tersebut. Inggris misalnya yang sudah tidak lagi menjadi hegemon global sejak berakhirnya perang dunia pertama karena negaranya yang hancur lebur akibat perang tersebut dan menghabiskan biaya yang besar dalam pembangunan kembali Inggris (Mitrovich, 2020). Kemudian Amerika Serikat yang sudah tidak lagi menjadi negara yang hegemon karena banyaknya negara *rising power* yang bermunculan dan mampu mengimbangi pengaruh dari Amerika Serikat; contohnya Brazil, Russia, India, Tiongkok, dan

Afrika Selatan (BRICS) (Acharya, 2014:8). Ketiadaan hegemon global pada saat wabah virus Ebola terjadi akhirnya mengakibatkan kerja sama internasional yang terjadi pun menjadi tidak optimal.

Kondisi absennya kepemimpinan global juga diperkuat dengan konsep *G-Zero* milik Bremmer yang menyatakan bahwa tiada suatu negara atau organisasi internasional yang mampu mengisi posisi kepemimpinan global (Bremmer, 2012:23). Bremmer juga menyebutkan bahwa organisasi internasional yang ada tidak akan bekerja secara efektif karena terdapat kepentingan yang berbeda pada negara organisasi internasional tersebut (Bremmer, 2012:23).

Setelah dilanda wabah virus Ebola pada tahun 2014, dunia kembali dihantui wabah penyebaran virus ketika virus Corona mulai menyebar ke berbagai negara pada pertengahan bulan Januari tahun 2020. Dengan status Corona sebagai wabah penyakit menular maka diperlukan berbagai kerja sama internasional agar penyebaran virus ini tidak menyebar lagi secara lebih jauh. Namun fakta yang terlihat di lapangan adalah kerja sama antar negara-negara internasional pada fase awal wabah virus Corona sangat tidak optimal dan tidak dapat menekan penyebaran virus saat itu. Situasi inipun akhirnya menyebabkan kondisi *vaccine nationality* dan *vaccine inequity* yang memperpanjang durasi wabah virus Corona dan merugikan dunia internasional. Sub-bab ini akan menjelaskan bahwa terdapat faktor anarki, sifat negara yang egois, situasi *prisoner dilemma*, absennya kepemimpinan global, serta kondisi dunia internasional yang berada dalam fase *G-Zero*.

Pertama-tama, kultur hubungan internasional yang anarki serta sikap negara yang egois ditunjukkan oleh hubungan diplomatik antara Tiongkok dan AS yang konflikual ketika dihadapi wabah virus Corona. Sikap Tiongkok yang menyensor segala informasi terkait virus Corona tanpa mempedulikan dampak tindakan ini ke berbagai negara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang egois dari Tiongkok. AS disisi lain juga tidak melihat penyebaran virus Corona sebagai ancaman bagi negaranya. Trump sebagai Presiden AS saat itu melakukan tindakan yang meremehkan penyebaran virus Corona dengan tidak mendengarkan para penasihat di gedung putih dan memutus aliran dananya ke WHO. Sikap kedua negara yang egois diperburuk dengan kultur anarkis dalam hubungan internasional. Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi dari negara membuat kedua negara besar ini sulit untuk bekerja sama pada fase awal penyebaran virus Corona.

Saat isu wabah virus Corona muncul ke permukaan pada tahun 2020, Tiongkok dan AS saling menuduh satu sama lain sebagai dalang penyebab kemunculan virus tersebut. Tiongkok menuding bahwa Corona merupakan virus ciptaan AS yang disebarkan ke wilayah Tiongkok melalui militernya dan AS yang menuding Tiongkok bahwa Corona merupakan virus alami milik ras Tiongkok (*Chinese Virus*) yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sikap dua negara besar yang saling tuduh ketika terjadi peristiwa wabah penyebaran virus berbahaya dapat dijelaskan menggunakan konsep *prisoner dilemma* dalam teori realisme. Tiongkok dan AS sebenarnya sedang berada di dalam posisi yang sama-sama tidak menguntungkan; Tiongkok yang berhadapan dengan kritik dari AS, serta AS yang menanggung banyak korban jiwa akibat wabah virus Corona yang terjadi. Salah satu opsi yang setidaknya mampu mengeluarkan kedua negara dari kondisi yang tidak menguntungkan ini adalah dengan kerja sama antara Tiongkok dan AS untuk menangani wabah virus Corona. Mengapa demikian? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara ini merupakan dua negara yang memiliki sumber daya serta finansial yang mumpuni untuk menangani penyebaran virus setingkat Corona. Namun sayangnya, kedua negara memilih untuk lebih mendahulukan ego mereka daripada bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Selain menggunakan *Prisoner Dilemma*, Sikap milik AS yang tidak responsif ketika menghadapi wabah virus Corona dapat dianalisis menggunakan *Hegemonic Stability Theory* dengan konsep *multiplex world* milik Acharya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya serta finansial yang mumpuni, AS bisa saja mengajukan diri menjadi inisiator dan memimpin penanganan wabah virus Corona yang terjadi. Namun situasi yang saat wabah virus Corona terjadi adalah AS telah kehilangan posisinya sebagai hegemoni global. Acharya dalam bukunya menyatakan bahwa dunia saat ini telah memasuki sebuah fase yang bernama *multiplex world*. Lebih lanjut, Acharya menjelaskan bahwa AS bukan lagi satu-satunya negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam dunia internasional. Bangkitnya berbagai negara berkembang maupun maju mengakibatkan lunturnya pengaruh AS secara global (Acharya, 2014:7). Bahkan kondisi yang terjadi kepada AS saat wabah virus Corona menghampiri wilayahnya adalah AS tidak mampu bertahan dari situasi penyebaran virus yang terjadi dan akhirnya menyebabkan kegagalan AS untuk mengatasi isu tersebut (TIME, 2020).

Pada tahun 2021, vaksin untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona akhirnya berhasil ditemukan dan diperbolehkan penggunaannya oleh WHO. Badan internasional yang mendapat mandat oleh WHO untuk menyebarkan vaksin kepada dunia adalah COVAX. Sebagai badan yang bertanggung jawab secara penuh dalam pendistribusian vaksin ke berbagai

negara di dunia, COVAX diharapkan mampu beroperasi secara efisien agar vaksin yang sudah diproduksi dapat terdistribusi secara merata. Namun sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa COVAX ternyata tidak mampu mendistribusikan vaksin secara merata karena situasi *vaccine nationalism* dan kemudian situasi ini menyebabkan kondisi *vaccine inequity* di berbagai wilayah di dunia. Kegagalan COVAX dapat dijelaskan menggunakan *Hegemonic Stability Theory* dan konsep entropi milik Schweller.

Saat wabah virus Corona terjadi, dunia internasional sudah memasuki kondisi dunia yang multipolar dengan dua negara berpengaruh yaitu AS dan Tiongkok. Ketiadaan sebuah hegemon tunggal untuk mendukung COVAX disini berimplikasi pada tidak optimalnya kinerja COVAX saat menjalankan tanggung jawabnya dalam mendistribusikan vaksin kepada khalayak internasional.

Sebagai salah satu hegemon dalam dunia yang multipolar, kemanakah AS yang sebelumnya telah membeli sebanyak 700 juta suplai vaksin dari Pfizer untuk disumbangkan kepada COVAX dan ingin membangun citra sebagai negara adidaya yang dermawan? Ternyata AS sedang disibukkan oleh program vaksinasi dosis ketiga (*booster*) kepada masyarakat di negaranya sendiri. Tindakan AS yang lebih mementingkan dirinya sendiri padahal memiliki suplai vaksin yang melimpah untuk membantu negara lain merupakan salah satu dampak dari lunturnya hegemoni AS dalam dunia internasional. Lunturnya pengaruh AS sebagai hegemoni global pada saat terjadinya wabah virus Corona dapat dilihat ketika AS lebih memilih tindakan-tindakan yang memicu kritik internasional dibandingkan pujian untuk memperkuat pengaruhnya. Seperti misalnya Trump yang menyebut bahwa virus Corona merupakan *kung-flu* dan *Chinese Virus* sehingga mengakibatkan peristiwa *asian hate* (Guardian, 2020). AS juga lebih memilih untuk menghentikan aliran dana kepada WHO alih-alih mendukung WHO dalam menangani wabah virus Corona yang terjadi (BBC, 2020). Selain itu juga, Trump memilih untuk tidak bergabung dengan COVAX karena cenderung lebih berpihak kepada Tiongkok (DW, 2020). Andai saja AS menggunakan pengaruhnya dengan baik dalam isu penanganan wabah virus Corona, seperti misalnya mendukung WHO dan COVAX secara maksimal, maka bisa saja posisi AS sebagai hegemoni global akan lebih kompetitif dan mampu menyaingi pengaruh milik Tiongkok.

Dengan ketiadaan dukungan dari AS kepada COVAX, kinerja yang dihasilkan oleh organisasi internasional ini pun menjadi tidak optimal. Jika merujuk pada *Hegemonic Stability Theory* milik Kindleberger dan Gilpin, vaksin sebagai *public goods* membutuhkan sebuah

hegemon yang mampu mengarahkan dan mendistribusikan produk ini secara merata. Seperti halnya Inggris yang mendistribusikan berbagai barang-barang publik ke berbagai wilayah negara saat menjadi hegemon pada abad ke-19 dan AS yang membantu negara-negara terdampak perang melalui IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank* paska Perang Dunia II. Jika dilihat, keda negara yang berstatus sebagai negara produsen vaksin, sebenarnya memiliki kapabilitas untuk mendistribusikan vaksin secara merata ke berbagai wilayah di belahan dunia. Namun sayangnya, jika merujuk konsep entropi milik Schweller, struktur internasional yang ada tidak memungkinkan hal tersebut terjadi karena tingginya entropi dalam kondisi dunia yang multipolar akibat negara-negara besar akan mendahulukan kepentingannya masing-masing dan saling mengadu pengaruhnya dalam lingkup internasional (Schweller, 2014:41).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tidak optimalnya kerja sama internasional ketika dihadapi oleh wabah penyakit menular seperti wabah virus Ebola dan wabah virus Corona diakibatkan oleh adanya kultur hubungan internasional yang anarki, sikap negara-negara yang egois atau *self-centric*, situasi *prisoner dilemma* antar negara-negara besar, absennya kepemimpinan global dan kondisi dunia *G-Zero*. Saat wabah virus Ebola menyerang untuk pertama kalinya pada tahun 2014, dua organisasi internasional yaitu WHO dan MSF tidak mampu untuk saling bekerja sama dan akhirnya memperparah situasi wabah yang terjadi. Dunia internasional juga menunjukkan respon yang tidak optimal dengan tidak merespon wabah yang terjadi walaupun MSF telah meminta bantuan dari negara-negara seperti AS, Inggris, dan Jerman. Kemudian ketika wabah virus Corona terjadi pada awal tahun 2020, negara besar seperti AS dan Tiongkok tidak mampu saling bekerja sama untuk menangani situasi wabah yang terjadi karena adanya kondisi *prisoner dilemma* dan sikap egois yang terjadi antar dua negara ini. COVAX selaku organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin pun tidak dapat bekerja dengan optimal karena absennya dukungan kepemimpinan global untuk membantu COVAX dalam mendistribusikan vaksinnya.

REFERENSI

- Acharya, A. (2014). *The End of American World Order*. Polity.
- Antunes, S., & Camisao, I. (2018). Introducing Realism in International Relations Theory. *E-Ir.Info*, 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/02/27/introducing-realism-in-international-relations-theory/>
- BBC. (2020). *Virus corona: Trump sebut WHO “boneka China”, ancam akan hentikan dana secara permanen - BBC News Indonesia*. 19 April. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52288751>
- BBC. (2020, April 15). *Coronavirus: US to halt funding to WHO, says Trump - BBC News*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52289056>
- BBC. (2021, March). *Coronavirus: EU stops short of vaccine export ban - BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-56529868>
- Bremmer, I. (2012). *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-zero world*. Portofolio Hardcover. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Burchill, S., Donnelly, J., Matthew, P., Smit, C., Linklater, A., Devetak, R., & Jacqui, T. (2005). *Theories of international relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan UK.
- Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations (Themes in international Relations)*. Cambridge University Press.
- DW. (2020). *US won't join WHO-led effort for coronavirus vaccine | News | DW | 02.09.2020*. DW. <https://www.dw.com/en/us-wont-join-who-led-effort-for-coronavirus-vaccine/a-54789175>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton University Press.
- Guardian. (2020). *Donald Trump calls Covid-19 “kung flu” at Tulsa rally | Donald Trump | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/20/trump-covid-19-kung-flu-racist-language>
- Ippolito, G., Di Caro, A., & Capobianchi, M. R. (2015). The chronology of the international response to Ebola in Western Africa: Lights and shadows in a frame of conflicting position and figures. *Infectious Disease Reports*, 7(2), 38–41. <https://doi.org/10.4081/idr.2015.5957>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1002/9781118574362.ch8>
- Kaplan, R. (2001). The Coming Anarchy. In *Atlantic*.
- Kindleberger, C. P. (1981). Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides. *International Studies*, 25(2), 242–254.
- Mitrovich, G. (2020, December 9). *Misreading Britain’s Decline—Identifying the Real Hegemonic Contest Between China and America > Minerva Research Initiative > Owl_View*. Minerva Research Initiative. https://minerva.defense.gov/Owl-In-the-Olive-Tree/Owl_View/Article/2440874/misreading-britains-declineidentifying-the-real

hegemonic-contest-between-china/

Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (Monalisa (ed.)). RajaGrafindo Persada.

Schweller, R. L. (2014). Maxwell's Demon and the golden apple: Global discord in the new millennium. In *Maxwell's Demon and the Golden Apple: Global Discord in the New Millennium*. <https://doi.org/10.1080/23340460.2015.973313>

The Washington Post. (2020). *U.S. says it won't join WHO-linked effort to develop, distribute coronavirus vaccine - The Washington Post*. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-vaccine-trump/2020/09/01/b44b42be-e965-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html

TIME. (2020). *Why the U.S. Is Losing the War On COVID-19 | Time*. <https://time.com/5879086/us-covid-19/>

Webb, M. C., & Krasner, S. D. (1989). Hegemonic stability theory: An empirical assessment. *Review of International Studies*, 15(2), 183–198. <https://doi.org/10.1017/S0260210500112999>

Wenham, C. (2017). What we have learnt about the world health organization from the ebola outbreak. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 372(1721), 1–5. <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0307>

Wenham, C. (2017b). What we have learnt about the world health organization from the ebola outbreak. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 372(1721). <https://doi.org/10.1098/RSTB.2016.0307>

WHO. (2020, December 28). *Listings of WHO's response to COVID-19*. <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline>